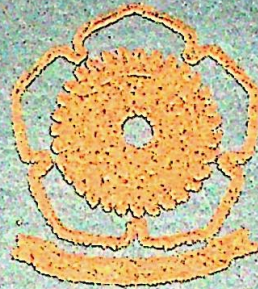


PERENCANAAN DAN PERANCANGAN BANGUNAN
BADAN DIKLAT SATU ATAP PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



PRINSIP TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI TEKNIK ARCHITECTUR
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Teknik Arsitektur

NAMA : NIRMAS DEWI MURCAH INDAH
NIM : 03023160016

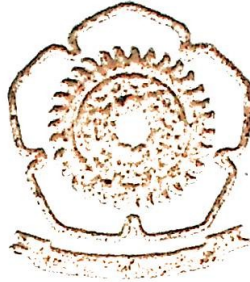
Pembimbing I: Ir. Setyo Nugroho, MScArch
Pembimbing II: Ir. Arie Siantoro, MScArch

Program Studi Teknik Arsitektur
Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik
Universitas Sriwijaya

729.07
Ind
2007

15615 / 15977

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN BANGUNAN
BADAN DIKLAT SATU ATAP PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



SKRIPSI TUGAS AKHIR

PROGRAM STUDI TEKNIK ARSITEKTUR

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai

Gelar Sarjana Teknik Arsitektur

NAMA : NYIMAS DEWIE HIKMAH INDAH

NIM : 03023160016

Pembimbing I: Ir. Setyo Nugroho. March

Pembimbing II: Ir. Arie Siswanto MCRP

Program Studi Teknik Arsitektur
Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik
Universitas Sriwijaya

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI TUGAS AKHIR

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN DIKLAT APARATUR SATU
ATAP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

OLEH :

NYOMAS DEWI HIKMAH INDAH

09021160016

Indralaya, Februari 2007

Mengenyai,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Ir. Setyo Nugroho, March)

(Ir. Arie Siswanto, MCRP)

NIP. 131 477 191

NIP 131 595 551

Program Studi Teknik Arsitektur

Jurusan Teknik Sipil

Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya

Ketua,




Ir. Chairul Murod, MT

NIP. 131 572 475

"God didn't promise days without pain,
Laughter without sorrow, sun without rain,
But He did promise strength for the day,
Comfort for the tears, and light for the way"

Kupersembahkan untuk :

- mama dan papa tersayang
- adekku dan kakakku tersayang

KATA PENGANTAR

Tulisan merupakan salah satu bentuk kreatifitas manusia. Tulisan telah menjadi bagian yang tak terlupakan dalam kehidupan manusia sehari – hari. Mahasiswa sebagai bagian dalam masyarakat yang tak pernah dapat lepas dari tulisan. Tulisan memiliki peranan yang sangat besar dalam mendukung ilmu pengetahuan.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan rahmat – Nya, akhirnya penulis sampai pada tahap akhir penyelesaian Program Studi Teknik Arsitektur Universitas Sriwijaya Palembang. Hanya dengan bantuan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi tugas akhir ini.

Selama mengikuti pendidikan Program Studi Teknik Arsitektur di Universitas Sriwijaya ini, penulis telah banyak mendapat bantuan baik secara moral maupun tenaga dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Secara khusus ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Ir. Chairul Murod. MT, selaku Ketua Program Studi Teknik Arsitektur yang telah memberikan perhatian dan dorongan mental agar penyusunan karya akhir ini diselesaikan dengan cepat.
2. Bapak Ir. Setyo Nugroho. March, selaku dosen pembimbing yang penuh kesabaran dan telah banyak meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing sejak awal penyusunan proposal hingga penyusunan karya akhir ini selesai.
3. Bapak Ir. Arie Siswanto selaku dosen pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu dan pikiran.

4. Ibu Ir. Hj. Meivirina Hanum, selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan perhatian, dorongan mental selama penulis mengikuti pendidikan.
5. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen beserta staff Program Studi Teknik Arsitektur atas perhatian dan arahannya selama mengikuti pendidikan di Program studi Teknik Arsitektur.
6. Teman- teman yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan karya akhir ini.
7. Seluruh staf dan karyawan Bandiklat Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan bantuan data kepada penulis selama melakukan pengumpulan data.
8. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Atas budi dan jasa baik dari semua pihak semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda. Mudah-mudahan hasil karya akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Palembang, Februari 2007

Penulis

ABSTRAKSI

Provinsi Sumatera selatan sebagai salah satu daerah yang menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan peluang sekaligus tantangan bagi setiap daerah untuk dapat melaksanakan pembangunannya atas prakarsa sendiri dengan berpedoman pada prinsip otomoni yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan otonomi daerah ini, daerah memiliki kewenangan khusus untuk meningkatkan kompetensi dan menyelenggarakan pendidikan pelatihan aparatur Negara yang diperuntukan bagi pegawainya (PNS) dan CPNS dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang ada.

Kaca kunci : otomoni, aparatur negara, provinsi, pendidikan-pelatihan.

DAFTAR ISI

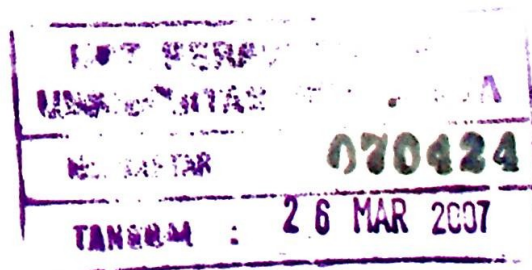
Lembar Pengesahan	i
Kata pengantar	ii
Abstraksi	iii
Daftar isi	iv
Daftar tabel	vi
Daftar diagram	viii
Daftar gambar	ix
Daftar lampiran	x

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan permasalahan	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Ruang lingkup perencanaan	4
1.5 Sistematika penulisan	4
1.6 Kerangka penulisan	7

BAB II. DIKLAT APARATUR NEGARA

2.1 Pengertian pendidikan dan pelatihan	8
2.2 Kelembagaan diklat	



2.2.1 Tugas dan fungsi diklat	9
2.2.2 Klasifikasi penyelenggaraan diklat	11
2.2.3 Pelaku pelaksanaan diklat aparatur	14
2.2.4 Perkembangan diklat	18
2.3 Pelaksanaan diklat aparatur	
2.3.1 Aktivitas pelaku penyelenggaraan diklat	22
2.3.2 Fasilitas diklat	24
BAB III. STUDI PROYEK	
3.1 Studi Bandiklat Sumsel sebagai objek	
3.1.1 Gambaran umum lokasi	26
3.1.2 Struktur Organisasi	27
3.1.3 Metode pelaksanaan kegiatan diklat	28
3.2 Gedung diklat sebagai fasilitas dalam peningkatan kompetensi aparatur pemerintah.	
3.2.1 Identifikasi lokasi	29
3.2.2 Identifikasi pelaku	31
3.2.3 Identifikasi kegiatan pelaku	36
3.2.4 Identifikasi fasilitas	39
3.3 Studi proyek sejenis (Diklat Kalimantan Selatan)	
3.3.1 Bandiklat Kalimantan Selatan	41
3.3.2 Kelembagaan Bandiklat Kalimantan Selatan	42
3.3.3 Kegiatan dan metode pembelajaran	44
3.3.4 Fasilitas di Bandiklat Kalimantan Selatan	46

3.4 Hasil identifikasi studi objek dan studi banding	
3.4.1 Pelaksanaan	50
3.4.2 Lokasi	51
3.4.3 Kapasitas fasilitas di Bandiklat	53

BAB IV. ANALISA

4.1 Analisa fungsional	
4.1.1 Pengelompokan pelaku kegiatan	58
4.1.2 Analisa kegiatan dan kebutuhan ruang	58
4.1.3 Rekapitulasi kebutuhan ruang	60
4.1.4 Besaran Ruang	60
4.1.5 Rekapitulasi luasan ruang	63
4.1.6 Alur kegiatan dan pelaku	63
4.1.7 Organisasi ruang	65
4.2 Analisa Kontekstual	
4.2.1 Analisa ruang makro	66
4.2.2 Analisa ruang mikro	67
4.2.3 Analisa klimatologi	67
4.2.4 Analisa sirkulasi.....	69
4.2.5 Analisa view	70
4.2.6 Analisa utilitas	71
4.2.7 Analisa struktur	72
4.2.8 Analisa gubahan massa	73

BAB V. KONSEP PENDEKATAN PERANCANGAN

5.1 Konsep Dasar Perancangan	74
5.2 Konsep Ruang	75
5.3 Konsep Zoning Bangunan.....	76
5.4 Konsep Tata Ruang Hijau.....	77
5.5 Konsep Utilitas	78
5.6 Konsep Struktur	80
5.7 Konsep Gubahan Massa	81
DAFTAR PUSTAKA	xi

DAFTAR TABEL

Tabel T1.	Eselonering Pemerintah Provinsi	15
Tabel T2.	Eselonering Pemerintah Kota	15
Tabel T3.	Pelaku dan kegiatan di Diklat	23
Tabel T4.	Kalender pelaksanaan Diklat di Bandiklat Sumsel	34
Tabel T5.	Kegiatan pelaksana	37
Tabel T6.	Kegiatan pengajar	37
Tabel T7.	Kegiatan peserta	38
Tabel T8.	Kegiatan umum	38
Tabel T9.	Fasilitas yang tersedia di Bandiklat Sumsel	39
Tabel T10.	Pelaksanaan Diklat di Bandiklat Sumsel	47
Tabel T11.	Identifikasi fasilitas dan kapasitas	55
Tabel T12.	Pengelompokan pelaku kegiatan	58
Tabel T13.	Kegiatan dan kebutuhan ruang	59
Tabel T14.	Rekapitulasi kebutuhan ruang	60
Tabel T15.	Kebutuhan luas ruang	62
Tabel T16.	Rekapitulasi kebutuhan luas ruang	63
Tabel T17.	Data klimatologi	67
Tabel T18.	Standart iluminasi ruang	71
Tabel T19.	Analisa struktur	72
Tabel T20.	Komparsi bentuk massa	73
Tabel T21.	Kebutuhan luas ruang	75

Tabel T22.	Konsep struktur	80
------------	-----------------------	----

DAFTAR DIAGRAM

Diagram D1. Kerangka berpikir	7
Diagram D2. Struktur organisasi Bandiklat Sumsel	14
Diagram D3. Hirarki kelembagaan Bandiklat Sumsel	27
Diagram D4. Estimasi jumlah pelaksana di Bandiklat Sumsel	33
Diagram D5. Struktur organisasi Bandiklat Kalimantan Selatan	42
Diagram D6. Identifikasi pelaksana di Bandiklat Sumsel	50
Diagram D7. Alur kegiatan pelaku di Bandiklat	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar G1.	Kerangka berpikir	7
Gambar G2.	Peta lokasi Bandiklat Sumsel	26
Gambar G3.	Peta lokasi dan bangunan Sumsel	29
Gambar G4.	Diklat teknis agama	31
Gambar G5.	Diklat PU	31
Gambar G6.	Bandiklat Sumsel	31
Gambar G7.	Sculpture di Bandiklat Kalimantan Selatan	42
Gambar G8.	Sarana Peribadatan di Kalimantan Selatan	43
Gambar G9.	Ruang kelas di Bandiklat Kalimantan Selatan	47
Gambar G10.	Sistem kerja AC Split	79
Gambar G11.	Sistem kerja utilitas air bersih.....	79
Gambar G12.	Sistem kerja utilitas hydrant	80
Gambar G13.	Sistem kerja instalasi listrik	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini, Indonesia tengah memasuki dan berada pada masa millennium yang ditandai dengan berbagai perkembangan dan perubahan dinamis dalam bidang kehidupan. Berbagai perubahan lingkungan tersebut terjadi karena ditunjang dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selanjutnya memberikan kontribusi dalam perubahan terhadap tata nilai kehidupan manusia yang terwujud dalam berbagai bidang kehidupan baik dalam aspek politik, ekonomi, hukum, tata pemerintahan maupun kehidupan sosial budaya.

Dalam bidang tata pemerintahan perubahan yang terjadi diakibatkan karena adanya tuntutan reformasi terhadap administrasi publik serta terhadap manajemen penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Dimana dalam penyelenggaraan tata pemerintahan, aparatur Negara selaku salah satu elemen birokrasi yang memegang peranan penting dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan juga memerlukan suatu perubahan kearah peningkatan guna mencapai tuntutan reformasi yang juga merupakan salah satu Tujuan Nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah inIndonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam penyelenggaraan tata pemerintahan daerah/ provinsi, tuntunan reformasi dilakukan dengan mempergunakan pendekatan desentralisasi. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan nuansa dan semangat desentralisasi dalam rangka otonomi daerah, pemerintah provinsi di setiap daerah dalam menghadapi tuntunan reformasi tersebut pemerintah melalui jajaran birokrasinya melakukan *penyelenggaraan diklat aparatur* yang diarahkan pada upaya peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah provinsi sehingga dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Diklat aparatur merupakan suatu lembaga bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan bagi CPNS dan bagi PNS dalam rangka meningkatkan kemampuan.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, diklat aparatur dapat dilakukan di beberapa tempat baik itu di Badan Diklat aparatur yang tersedia di setiap daerah, diklat aparatur di instansi pemerintahan masing-masing, ataupun di diklat-diklat teknis lainnya. Pelaksanaan diklat yang dijadikan sebagai objek perancangan ini memiliki beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu : kurangnya penyediaan sarana maupun prasarana bangunan diklat yang representatif, sirkulasi bangunan yang kurang jelas, fungsi ruangan yang tidak jelas, permasalahan lansekap, bentuk serta perletakan massa bangunan yang ada di diklat.

Mayoritas gedung diklat yang ada di setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan itu diakibatkan karena adanya pengaruh budaya, kebijakan pemerintah, kapasitas yang dipergunakan, kebutuhan

fasilitas, sampai pada image yang ingin ditampilkan. Umumnya bangunan diklat yang ada di daerah memberikan image bangunan yang resmi, dengan menawarkan penataan bangunan yang kaku, formal, tegas dengan penggunaan bentuk-bentuk persegi, penggunaan atap-atap tradisional daerah sebagai langgam bangunan pemerintahan. Image yang ditampilkan seharusnya lebih melihat semata-mata bukan kepada aspek kebijakan pemerintah, tetapi juga melihat dari kebutuhan yang ada pada para pelaku kegiatan yang dalam hal ini adalah aparatur Negara (PNS maupun CPNS). Kondisi diklat yang seperti ini juga terjadi pada bangunan diklat di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan berorientasi pada issue-issue tersebut maka direncanakan perancangan Bangunan Diklat Aparatur Satu Atap Sumatera Selatan.

1.2 Rumusan Permasalahan

Adapun rumusan permasalahan adalah bagaimana merancang bangunan yang dapat memenuhi kebutuhan bagi pelaku dalam penyelenggaraan diklat secara fisik (kapasitas, penyediaan fasilitas, tampilan bangunan, pengolahan tapak) serta secara nonfisik (nuansa bangunan).

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang direncanakannya perencanaan desain Badan Pendidikan dan Pelatihan Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan adalah agar terwujudnya sarana dan prasarana diklat yang lebih representatif yang sesuai

dengan kemajuan iptek dan mendukung terwujudnya pelaksanaan *Diklat Satu Pintu*.

1.4 Ruang lingkup perencanaan

Adapun ruang lingkup yang akan dibahas pada perencanaan desain Badan Pendidikan dan Pelatihan Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan adalah

- Mengenal objek yang akan dirancang baik dari kelembagaan sampai pada bangunan serta standart sarana dan prasarana yang ditetapkan.
- Menganalisa objek kasus yang dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam perencanaan perancangan Bandiklat Provinsi Sumatera Selatan.
- Menyusun konsep yang nantinya dipergunakan dalam perencanaan desain Bangunan Badan Diklat Aparatur Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

1.5 Sistematika Penulisan

Pembahasan pada penulisan ini terbagi menjadi empat tahap, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan mengenai latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan, ruang lingkup pembahasan serta sistematika penulisan.

BAB II KELEMBAGAAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR NEGARA

Berisikan mengenai kelembagaan objek yang dipilih seperti pengertian, organisasi kelembagaan, tugas pokok, pengguna bangunan, bagaimana dan apa saja perkembangan pendidikan dan

pelatihan di Provinsi Sumatera Selatan, disertai tentang gambaran umum dari Provinsi Sumatera Selatan.

BAB III BANDIKLAT PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN STUDI OBJEK SEJENIS

Pada bab ini berisikan mengenai studi objek yang dipergunakan dalam perencanaan perancangan bangunan Diklat. Pendeskripsian objek terdiri dari deskripsi mengenai kelembagaan, sarana dan prasarana serta permasalahan yang ada.

BAB IV ELABORASI TEMA

Berisikan mengenai pengertian tema, apa yang menjadi latar belakang dari pemilihan tema, tinjauan tema yang dipergunakan, serta bagaimana interpretasi tema.

BAB V ANALISA

Analisa yang dibahas dalam bab ini mengenai:

- Permasalahan internal bangunan

Seperti : analisa ruang (kebutuhan dan besaran ruang, organisasi ruang, hubungan ruang), utilitas, struktur.

- Permasalahan eksternal bangunan

Seperti : analisa tapak (pemilihan site dan alternatifnya, kondisi lahan, kondisi lingkungan alamiah), analisa bentuk, utilitas dan tata hijau.

BAB VI KONSEP PERANCANGAN

Bab ini berisikan mengenai konsep perancangan yang dipergunakan. Konsep tersebut antara lain : konsep dasar, tata bangunan luar, bentuk bangunan, konsep struktur serta mechanical-electrical.

1.6 Kerangka berfikir

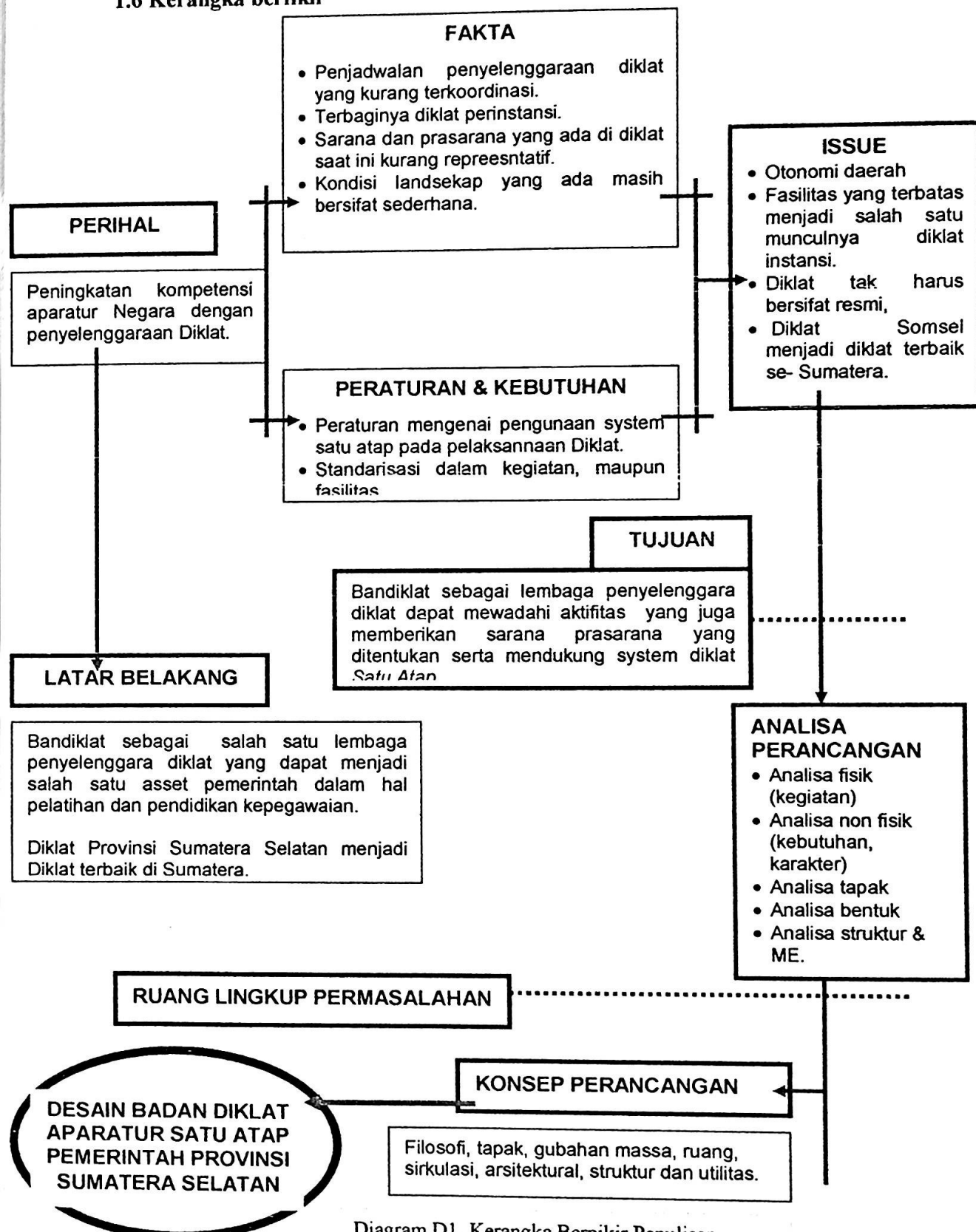


Diagram D1. Kerangka Berfikir Penulisan

DAFTAR PUSTAKA

Bratakusuma Deddy Supriady. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Cristina Montes. 2003. *New Offices*. New York : Harper Design Internatioal.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Executive Summary Review. *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang*. Palembang.

Paul Mcgillick. 2005. *Sydney Architecture*. Singapore : Pesaro Publishing.

Pemerintah Kota Palembang. 2003. *REPETADA Kota Palembang*. Palembang.

Rob Krier. 2001. *Komposisi Arsitektur*. Jakarta : Erlangga.

The Athletic Institute. 1985. *Planning Facilities for Athletics Physical Education and Recreation*. Virginia.

Undang Undang Otonomi Daerah. 1999. Citra UMBARA. Bandung
